

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana: Jakarta
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, MARI, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gofar, Abdullah, 2014, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Harahap, Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 2004, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang
- Ilham Arisaputra, Muhammad, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kalsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung

- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mujahidin, Ahmad 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mertokusumo, Sudikno 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik dan Mohammad Saleh, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Persepektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Perangin, Effendi, 2010, *Mencegah Sengketa Tanah*, Cetakan Ketujuh, Rajawali, Jakarta
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Rezah, Farah Syah, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. Sosial Politik Genius, Makasar.
- Sutedi, Adrian, 2019, *Perlihatan Hak atas Tanah dan Peralihannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeroso, R, 2011, *Penngantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shomad, Abdul, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Sangaji, Z.A, 2013, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suparni, Niniek, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 2014. *Aneka Perjanjian*, Cet. Kesebelas, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers. Jakarta
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung.
- Triwulan, T dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tresna, Mr R., 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet.8
- Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Vollmar, 1994, *Pengantar Study Hukum Perdata*, (terjemahan IS Adiwimarta), Penerbit Radjawali, Jakarta
- Wantu, Fance. M., 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, UNG Press, Gorontalo,

Jurnal:

- Akbar, Ade Kurniawan, 2018, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.2
- Ainina, Zhafrin Nur., 2020 "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/pdt/2017)". *Indonesian Notary*, 2(2).
- Almuntazar, Muhammad Amin, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, 2019, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 7, No..2

- Basri Harahap, Risalan, 2019, "Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2.
- Fardianzah, Amirudin, 2016, "Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang,
- Fikri Syuhada, Muhammad, 2019, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol 3, No. 2
- Isnantiana, Nur Iftitah, 2017, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18, No. 2
- Isnaini, Hatta,Wanda, Hendry Dwicahyo, 2017, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, Nomor: 3.
- Larasati, Fadhila Restyana, and Marjo Ana Silviana, 2016, "Kekuatan Hukum Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PTUN/.Sby)." *Diponegoro Law Journal* Vo. 5, No.3
- Mehdini, Fihtri, 2019, "Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Hibah di Kota Batam." *Addayyan: Jurnal Mu'amalah Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 14,Nomor 1
- Nurhayati,Bernadeta Resti,, 2019 "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.5, No.1
- Nengsih, Rahma, 2020, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/Ptun. Bkl)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 5., No. 2
- Paparang, Fatmah, 2016. "Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak". *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.22, No.6.
- Putu Happy, Luh, 2019 "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan." *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6, Nomor 1
- Purwendah, Elly Kristiani,2014 "Pergeseran Asas Point d' Interet Point d' Action Dalam Gugatan Citizen Law Suit Dan Actio Popularis Sebagai Pemenuhan Asas Manfaat Dalam Peradilan Perdata." *Cakrawala Hukum* vol.15, No.41
- Poesoko, Herowati, 2015 "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.1, No.2.

- Rangkuti, Ahmad Budinata, 2015 "Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya terhadap Sertipikat Hasil Peralihan Hak." *Premise Law Journal*, Vol.5, No. 14
- Rahma Hadiyanti, Anisa, Rachmad Safa'at, Tunggul Anshari. 2017, "Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Lentera Hukum Vol 4*, No. 3
- Rismayanthi, Ida Ayu Wulan., 2016, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. No.7*
- Rumadan, Ismail. 2017 "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 6, No. 1
- Stansya Rosalina Oping, Meylita 2017 "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* Vol. 5, No. 7
- Suisno, 2017 "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Independent*, Vol.5 No.1,
- Tanaya, Josua & Djajaputra, Gunawan, 2021. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017)". *Jurnal Hukum Adigama*, Vo. 3. No.2.
- Triyono, 2019 "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.17.No. 2.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, 2019 "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid." *CREPIDO* Vo. 1, No. 1
- Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, Sarip, 2019 "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4. No..2
- Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, I. Made Arjaya, dan I. Putu Gede Seputra, 2021, "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.)." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1

Yunarko, Bambang, 2013 "Kedudukan Jabatan dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara." *Perspektif*, Vol.18, No.3

Zainuddin, Asriadi, 2017 "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* vol.1, No. 1

Tesis dan Disertasi:

Awuy, Justicia Dhara V, 2010, “ Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah”, *Tesis*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya

Dyah Wijayanti, Ika, 2014, "Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah Karena Adanya Cacat Hukum (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 111/Pdt. G/2001/PN. Ska., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 370/Pdt/2003/PT. Smg., dan Putusan Mahkamah Agung No. 2590 K/Pdt/2004)." , *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dwi Kuncoro Hadi,M 2011. “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt. G/1998/PA. TG)” *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang

Fitria, Infa'na, 2014. "Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi perbandingan." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Gusmi, , 2011 “ Akibat Hukum Pembatalan Akta PPAT Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177 K/Pdt/2006)” . *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang: Semarang

Khairunnisa, Ela, 2019,. "Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer." *Tesis*, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Lawindra, Febriani, 2019, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt. G/2014/PN. Cbn)." *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Maisaroh, 2017. “Studi komparasi penarika hibah dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah”, *Disertasi*, IAIN Padangsidempuan, Padangsidempuan

Triastika, Trivania, 2020, “ Perlindungan Hukum Penerima Hibah Akibat Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Tesis* , Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Wijaya, Hensri, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembatalan Akta Hibah Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 6/PDT/2018/PT PTK)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yusuf, Ahmad, 2020. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)." *Tesis*, Universitas Tadulako, Tadulako.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3746);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan PTUN Semarang No. 141/G/2018/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 0216/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr

Kompilasi Hukum Islam